

Strategi Percepatan Pertumbuhan dan Transformasi Struktural Kabupaten dan Kota (Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Andi Pramaria

Widyaiswara Ahli Utama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Kata Kunci

Posisi sektor, disparitas antardaerah, intervensi strategi

Abstrak

Pembangunan Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi persoalan menyangkut struktur ekonomi yang masih mengandalkan sektor primer dan tersier; pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun (2015-2020); ketimpangan antardaerah; dan intervensi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum menunjukkan jenis dan lokasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Tujuan penelitian adalah (1) menentukan posisi masing-masing sektor; (2) menganalisis disparitas antardaerah; dan (3) merumuskan rancangan intervensi strategi pertumbuhan dan transformasi struktural. Alat analisis yang digunakan adalah (1) *Location Quotion* (LQ) untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis, (2) *Shift Share* (SS) untuk mengetahui pertumbuhan dan transformasi, (3) Teknik *overlay*, untuk mengetahui posisi sektor, (4) Indeks *Williamson* untuk mengetahui ketimpangan antardaerah, (5) tipologi *Klassen* untuk mengetahui posisi antardaerah, dan (6) analisis RPJMD untuk mengetahui strategi ekonomi dalam pertumbuhan dan transformasi struktural. Hasil penelitian menunjukkan (1) meskipun pertumbuhan ekonomi daerah cenderung menurun, namun masih terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif dan mempunyai keunggulan; (2) Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar dalam katagori daerah makmur, makmur dalam proses menurun dan tertinggal dalam proses membangun, (3) intervensi strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural dilakukan melalui (a) pengembangan Pertanian dan Investasi; (b) pengembangan Pariwisata yang Diandalkan, dan (c) pengembangan Perindustrian yang Unggul.

Keywords

Sector position, disparity between regions, strategic intervention

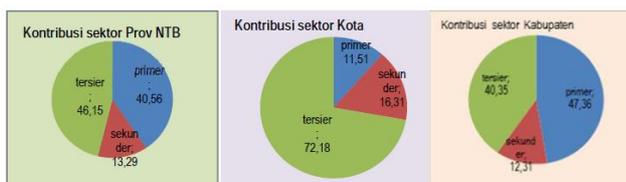
Abstract

District and City Development in West Nusa Tenggara Province faces problems regarding the economic structure that still relies on the primary and tertiary sectors; economic growth that tends to decline (2015-2020); inequality between regions and the intervention of the West Nusa Tenggara Provincial government which has not shown the types and locations of activities as stated in the RPJMD. The research objectives are (1) to determine the position of each sector; (2) analyze the disparity between regions; and (3) formulating the design of intervention strategies for growth and structural transformation. The analytical tools used are (1) Location Quotion (LQ) to determine the basic and non-basic sectors, (2) Shift Share (SS) to determine growth and transformation, (3) Overlay technique, to determine sector position, (4) Williamson Index to determine the inequality between regions, (5) Klassen typology to determine the position between regions, and (6) RPJMD analysis to determine the economic strategy in growth and structural transformation. The results of the study show (1) although regional economic growth tends to decline, there are still some sectors that are able to grow positively and have advantages; (2) Districts and Cities in West Nusa Tenggara Province are divided in the category of prosperous regions, prosperous in the process of declining and lagging behind in the development process, (3) intervention strategies for accelerating growth and structural transformation are carried out through (a) Agriculture and Investment development; (b) Development of Reliable Tourism, and (c) development of Superior Industry.

*Corresponding Author: Andi Pramaria, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia
Email: andipramaria@gmail.com

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor tersier yang merupakan sektor jasa-jasa mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. Kontribusi sektor tersier yang mencapai 46,15% mengindikasikan bahwa sektor tersier cukup dominan dalam perekonomian daerah. Selanjutnya sektor primer sebagai sektor yang memanfaatkan sumber daya alam, menempati urutan kedua mencapai 40,56%, dan sektor sekunder mencapai 13,29%. Kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB tahun 2020, menunjukkan bahwa sektor primer sangat mendominasi pada daerah Kabupaten sedangkan pada daerah Kota perekonomian didominasi oleh sektor tersier.



Gambar 1. Kontribusi sektor pembentuk PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Penurunan laju pertumbuhan terbesar dialami pada tahun 2018 yang disebabkan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi. Tahun 2019 dan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebagai akibat masa pandemi Covid 19, yang berdampak pada pelambatan ekonomi. Pertumbuhan pada tahun 2020 mengalami penurunan kecuali pada Kabupaten Sumbawa Barat yang mengandalkan hasil tambang.

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lobar	4,07	4,94	(0,89)	2,37	(8,34)
2.	Loteng	4,60	5,44	2,20	3,17	(7,45)
3.	Lomtim	4,36	5,40	2,63	3,95	(3,74)
4.	Sumbawa	4,38	5,86	3,21	3,97	(4,93)
5.	Dompu	3,66	5,23	2,91	3,04	(4,45)
6.	Kab.Bima	4,14	5,14	2,98	3,26	(4,39)
7.	KSB	4,15	(21,59)	(36,30)	(3,76)	25,54
8.	KLU	4,18	5,10	(1,78)	4,98	(8,19)
9.	Mataram	5,88	5,95	2,98	3,57	(7,21)
10.	Kot Bima	3,60	4,53	2,66	3,13	(6,79)
11.	Prov.NTB	5,81	0,09	(4,50)	3,90	(0,64)

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, dalam kaitannya dengan percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural dilakukan melalui (1) pengembangan pertanian dan investasi berkualitas, (2) pengembangan pariwisata yang diandalkan, dan (3) pengembangan perindustrian unggul.

Hasil penelitian Mohammad Saedy Romli, Manuntun Parulian Hutagaol, Dominicus Savio Priyarsono (2016), dengan judul “Faktor-faktor dan Pengaruhnya terhadap Disparitas Pendapatan di Madura” menyimpulkan (a) populasi dan pendapatan perkapita menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya transformasi struktural di Madura, (b) variabel populasi dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap perubahan nilai tambah sektor pertanian dan industri, dan (c) variabel populasi sektor jasa hanya yang berpengaruh secara signifikan. Eko Wicaksono Pambudi, Miyasto (2013), melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, menyimpulkan (a) variabel investasi dan variabel angkatan kerja yang bekerja, memberi berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, (b) aglomerasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan, dan (c) variabel *human capital investment* mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya Sisilia Kosuma, Sutomo Wim Palar, Agnes L. Ch. P. Lopian (2016), melakukan penelitian “Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate”. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quatient (LQ)* dan *Shift Share (SS)* menyimpulkan (a) kontribusi perkembangan struktur perekonomian Kota Ternate didominasi oleh sektor perdagangan, sektor pengangkutan, dan sektor jasa-jasa, (b) terdapat enam sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa-jasa serta tiga sektor yang merupakan sektor nonbasis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, dan (c) terdapat lima sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan berdayasaing yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan hasil interaksi yang kompleks diantara berbagai aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga akan menjadi sulit untuk menentukan satu penyebab awal dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perubahan pada perekonomian wilayah bisa berdiri sendiri (*independent*) dari dalam daerah dan dapat bersifat dorongan dari luar daerah (*eksogeneus*) atau bahkan merupakan sebuah kejadian kasualitas yang berkaitan (Arsyad, 2020). Menurut Schultz dalam Jhingan (2018), untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, maka perlu mengalokasikan modal dalam aktivitas usahanya dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kuantitas barang yang diproduksi, (2) memperbaiki kualitas manusia sebagai agen produksi, dan (3) meningkatkan kadar seni atau proses produksinya. Negara-negara/daerah yang sudah maju, biasanya ditandai oleh luasnya sektor sekunder, sedangkan pada negara/daerah terbelakang, biasanya ditandai oleh luasnya sektor primer yang masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.

Transformasi struktural

Kuncoro (2019) menjelaskan bahwa proses transformasi dalam pembangunan diindikasikan oleh pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergeseran yang terjadi pada pondasi ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi yang tumbuh terus berakibat terjadinya pergeseran struktur perekonomian pada suatu daerah. Transformasi struktural, pada dasarnya merupakan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian atau sektor industri ke sektor jasa-jasa dan setiap sektor juga mengalami proses transformasi tidak sama. Proses transformasi struktural, seringkali dinyatakan sebagai proses industrialisasi yang digambarkan dalam bentuk peningkatan sumbangan sektor industri manufaktur yang ditandai peningkatan permintaan konsumen, total PDRB, ekspor dan kesempatan kerja. Jhingan (2018) menyatakan bahwa transformasi struktural merupakan proses transisi dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat ekonomi maju yang meliputi perubahan kelembagaan, sikap sosial, dan perubahan motivasi secara mendasar. Transformasi struktural yang seperti ini akan lebih banyak membuka lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja, ketersediaan modal, sumber-sumber daya baru yang dapat dimanfaatkan, serta penggunaan teknologi yang semakin maju.

Pertumbuhan Ekonomi dan Keterkaitan

Keterkaitan ekonomi (*economic linkage*) diukur pada gambaran yang menghubungkan antara perkembangan perekonomian daerah dengan

lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2020).

1). Location Quotion (LQ)

LQ merupakan alat analisis yang dipakai untuk mengukur tingkat konsentrasi suatu aktivitas ekonomi atau sektor pada suatu wilayah. Alat analisis LQ, ditujukan untuk melihat sektor basis dan sektor nonbasis pada wilayah, dengan rumus:

$$LQ = \frac{(sib)}{(\sum sb)} : \left(\frac{Sia}{\sum Sa} \right)$$

dimana :

sib = nilai tambah dari sektor i di Kab/wilayah

sb = seluruh nilai tambah sektor di Kab/Kota

Sia = nilai tambah dari sektor i Provinsi NTB

Sb = seluruh nilai tambah sektor di NTB

Kriteria hasil perhitungan tersebut adalah :

- $LQ > 1$; adalah suatu sektor, termasuk sektor basis dan mempunyai potensi ekonomi yang lebih besar secara relatif dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain, mempunyai pangsa pasar ekspor (luar daerah)
- $LQ < 1$; adalah suatu sektor, termasuk sektor nonbasis yang secara relatif mempunyai potensi ekonomi rendah, tidak termasuk sektor ekspor, bahkan belum cukup memenuhi kebutuhan dalam daerah sen
- $LQ = 1$; adalah sektor nonbasis dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri

2). Shift Share (SS)

Kinerja sektor-sektor dalam perekonomian Kabupaten/Kota diukur dengan membandingkan kinerja sektor-sektor ekonomi daerah referensi. Analisis *shift-share*, digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi selama periode pengamatan. Jika *output* bertambah, maka daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan. Analisis *Shift-Share* memberikan gambaran hasil kerja perekonomian suatu daerah dalam tiga bidang yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu *regional share*, *proporsional shift* dan *differensial shift*, dengan menggunakan formula:

a. *Pertumbuhan ekonomi daerah (Regional Share)*, adalah komponen pertumbuhan Nasional (PN) dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat. PN merupakan perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi Nasional. Komponen ini dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$PN_{ij} = (Ra) Y_{ij}$$

dimana :

- PN_{ij} = Komponen pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sektor i pada wilayah Kabupaten/Kota
- Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada wilayah Kabupaten/kota pada tahun dasar (2010)

Ra = Rasio PDRB pada Provinsi NTB

b. *Pergeseran proporsional (proportional shift)* atau komponen pertumbuhan proporsional (PP), disebabkan adanya perbedaan setiap sektor dalam permintaan produk akhir, ketersediaan bahan baku, kebijakan industri dan struktur pasar. PP digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada suatu daerah dengan wilayah di atasnya. Pengukuran komponen ini dihitung dengan persamaan :

$$PP_{ij} = (R_i - Ra) Y_{ij}$$

dimana :

- PP_{ij} = komponen pertumbuhan proporsional (proporsional shift) sektor i untuk wilayah Kab/Kota
 Y_{ij} = Nilai tambah dari sektor i pada wilayah Kab/kota pada tahun dasar (2010)
 R_i = Rasio PDRB dari sektor i pada Provinsi NTB
 Ra = Rasio PDRB pada Provinsi NTB

Apabila $PP_{ij} < 0$, menunjukkan bahwa sektor i pada Kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang lambat, dan jika $PP_{ij} > 0$, menunjukkan bahwa sektor i Kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat.

c. *Pergeseran diferensial (differential shift)* atau komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) adalah komponen yang timbul karena peningkatan atau penurunan produksi dalam wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi wilayah. Komponen ini akan membantu dalam menentukan daya saing industri Kabupaten/Kota dengan perekonomian daerah referensi. Rumus yang digunakan adalah:

$$PPW_{ij} = (r_i - Ri) Y_{ij}$$

dimana :

- PPW_{ij} = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah Kabupaten/Kota
 Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada wilayah Kab/kota pada tahun dasar
 r_i = rasio PDRB sektor i pada Kabupaten/kota
 Ri = rasio PDRB sektor i pada Provinsi NTB

Apabila $PPW_{ij} > 0$, berarti sektor i di wilayah Kabupaten/kota mempunyai daya saing yang baik dibandingkan sektor yang sama di wilayah Provinsi NTB, dan apabila $PPW_{ij} < 0$, berarti sektor i di wilayah Kabupaten/Kota relatif tidak mempunyai daya saing dibandingkan sektor yang sama di wilayah Provinsi NTB.

d. *Pergeseran Bersih (PB)* dihitung dengan menjumlahkan komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah, dengan rumus :

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

dimana :

- PB_{ij} = pergeseran bersih sektor i Kab/ kota
 PP_{ij} = komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah Kabupaten/Kota
 PPW_{ij} = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah Kabupaten/Kota

Apabila nilai $PB_{ij} \geq 0$, maka dapat dikatakan bahwa sektor i di wilayah Kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang progresif (maju) dan jika $PB_{ij} < 0$, menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor i pada wilayah Kabupaten/kota tergolong lambat.

e. Total Perubahan (nilai *shift share*), menunjukkan perubahan perekonomian yang terjadi pada Kabupaten/kota selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Rumus yang digunakan adalah :

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

dimana :

- ΔY_{ij} = Perubahan PDRB Kabupaten/ kota selama kurun waktu penelitian (2010-2020)
 PN_{ij} = Komponen pertumbuhan Provinsi NTB sektor i pada wilayah Kabupaten/kota
 PP_{ij} = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah Kabupaten/Kota
 PPW_{ij} = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah Kabupaten/Kota

3). Teknik Overlay

Teknik overlay *LQ* dan *Shift-Share* untuk menentukan posisi masing-masing sektor pada setiap daerah analisis. Tujuan utama dari analisis overlay adalah untuk menganalisis lebih jauh kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi (analisis *LQ*) dan kriteria pertumbuhan (analisis *shift-share*). Teknik overlay akan menghasilkan kondisi dan posisi masing-masing sektor dalam empat kuadran.

Tabel 2. Teknik Overlay LQ dan SS

Kriteria	SHIFT-SHARE	
	+	-
$LQ > 1$	Sektor Prima	Sektor Maju, tapi Tertekan
$LQ < 1$	Sektor Berkembang	Sektor Tertekan

Sumber : Arsyad, 2020 (dimodifikasi)

4). Indeks Williamson

Analisis Williamson digunakan untuk mengukur indeks ketimpangan ekonomi antardaerah. Formulasi yang digunakan adalah :

$$Vw = \sqrt{\frac{\sum(y_i - y)^2 f_i / n}{y}}$$

dimana :

- y_i = PDRB perkapita Kabupaten/kota
- y = PDRB rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/kota
- n = Jumlah penduduk Provinsi NTB

Kriteria dalam perhitungan Indek Williamson ditunjukkan :

- Nilai 0,0 sampai dengan 0,2; maka ketimpangan antardaerah tergolong rendah atau relatif merata,
- Nilai 0,21 sampai 0,35; maka ketimpangan antardaerah tergolong sedang, dan
- Nilai >0,35; maka ketimpangan antardaerah tergolong tinggi.

5). Tipologi Klassen

Tipologi Klassen, digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing Kabupaten/Kota dalam empat kuadran. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat pendapatan dan laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota dengan tingkat pendapatan dan laju pertumbuhan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendapatkan tipologi berdasarkan indikator ekonomi dilakukan dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3. Kuadran tipologi Klassen

Tingkat pendapatan perkapita	Tingkat pertumbuhan	
	Tinggi ($r_i > r$)	Rendah ($r_i < r$)
Tinggi ($y_i > Y$)	Daerah makmur	Daerah tertinggal dalam proses membangun
Rendah ($y_i < Y$)	Daerah makmur yang sedang menurun	Daerah tertinggal

Sumber : Arsyad, 2020 (dimodifikasi)

dimana :

- y_i = pendapatan perkapita rata-rata Kabupaten/Kota
- Y = PDRB rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- r_i = laju pertumbuhan Kabupaten/ Kota,
- r = laju pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, yang selanjutnya dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Pertimbangan utama dalam perubahan RPJMD tersebut adalah (1) hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, (2) terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang

berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, (3) perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, (4) perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan (5) adanya catatan dari hasil review Kementerian PANRB yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Visi dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah “Membangun NTB yang Gemilang” dengan 6 Misi, yaitu :

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP, melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Percepatan pertumbuhan ekonomi termasuk dalam misi kelima yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Tujuan utama Misi ini adalah (1) Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas, (2) Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan, dan (3) Terwujudnya perindustrian yang unggul.

Strategi Pengembangan Potensi Sektor

Persoalan utama pembangunan daerah, terletak pada penempatan prioritas-prioritas strategi dan kebijakan pembangunan berdasarkan

nilai khas suatu daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia daerah. Dasar arah pembangunan ini, mendorong pada pengembangan inisiatif-inisiatif daerah bagi proses pembangunan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2020).

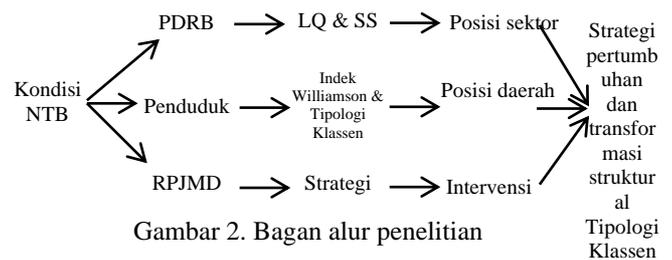
Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa salah satu manfaat dari hasil analisis pertumbuhan ekonomi regional adalah dapat dimanfaatkan untuk membantu perumusan strategi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Implikasi kebijakan ini bisa ditarik dari hasil analisis tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional. Karena masing-masing model mempunyai penentu tersendiri maka implikasi kebijakan dari setiap model pertumbuhan regional juga akan berbeda pula. Lebih lanjut Sjafrizal (2018) menyatakan sasaran utama penetapan sektor prima daerah pada dasarnya adalah agar lebih mengarahkan kebijakan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah. Sedangkan arah pembangunan tersebut dapat ditetapkan dengan jalan memberikan prioritas pengembangan kepada sektor prima pada daerah tersebut. Dengan cara demikian, proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan lebih dapat dioptimalkan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat pula ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokus Kabupaten dan Kota dan daerah referensi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah tahun 2010-2020, kecuali untuk Kota Bima digunakan tahun 2016-2020, karena ketersediaan data.

Sumber data utama adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten dan Kota. Pengambilan data dilakukan melalui pengunduhan internet, meliputi data PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, PDRB Kabupaten dan Kota, serta jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2020.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Location Quotion (LQ)*, *Shift Share (SS)*, teknik overlay, indeks Williamson dan tipologi Klassen. Intervensi strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.



Gambar 2. Bagan alur penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan posisi sektor

Berdasarkan hasil overlay analisis LQ dan SS diketahui bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten dan Kota mengalami kecenderungan menurun, namun masih terdapat sektor-sektor prima yang mampu cepat tumbuh. Menurut Sjafrizal (2018) penetapan sektor prima daerah dimaksudkan agar lebih mengarahkan kebijakan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah.

Sektor prima atau sektor unggulan, diindikasikan oleh nilai $LQ > 1$ dan SS tumbuh positif. Hal ini berarti sektor ini telah mempunyai pangsa pasar ekspor dan mampu cepat tumbuh. Sektor berkembang ditandai oleh nilai $LQ < 1$ dan SS positif, mengindikasikan bahwa sektor tersebut mampu tumbuh cepat tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Sebaliknya, sektor maju tetapi tertekan ditandai oleh nilai $LQ > 1$ dan nilai SS negatif, yang berarti mempunyai pasar ekspor tetapi tidak mampu tumbuh cepat. Sektor tertekan ditandai oleh nilai $LQ < 1$ dan nilai SS negatif, yang berarti tidak mempunyai kontribusi perekonomian dan tidak mampu tumbuh. Oleh karena itu, sektor dalam katagori tertekan tidak perlu dikembangkan dan tenaga kerja pada sektor tersebut dapat dialihkan.

Sektor-sektor dengan katagori prima, perlu mendapat prioritas pengembangan dalam rangka percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural. Hal ini disebabkan sektor prima sudah mempunyai pasar luar daerah, sudah mampu memenuhi konsumsi dalam daerah, yang berarti mampu memberikan kontribusi perekonomian daerah serta mampu tumbuh cepat. Mengingat ketersediaan anggaran tidak tak terbatas, maka prioritas dapat dilakukan pada sektor-sektor prima.

Sektor berkembang perlu diarahkan pada perluasan pasar mengingat mempunyai pertumbuhan yang cepat, namun belum memberikan kontribusi ekonomi daerah. Sektor maju tapi tertekan harus ditumbuhkan dengan memperbanyak produksi karena sudah mempunyai pasar ekspor.

Tabel 4 menunjukkan sektor-sektor yang masuk dalam katagori prima, berkembang, maju tapi tertekan dan sektor tertekan. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural masing-masing Kabupaten dan Kota, maka posisi sektor-sektor tersebut perlu menjadi pertimbangan. Kebijakan dan strategi dapat ditentukan dengan menempatkan 2 pilihan yaitu *big push* dan *unballance*. Kebijakan *big push* diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan mengkolaborasikan ekonomi lokal. Strategi utamanya adalah mendorong sektor-sektor prima pada suatu daerah, sehingga akan mempercepat pertumbuhan. Pelibatan ekonomi lokal dimaksudkan

untuk menekan gejolak sosial serta pemanfaatan potensi lokal yang tersedia, sehingga akan mampu menjamin keberlanjutan. Kebijakan *unballance* merupakan kondisi pendapatan yang tidak merata sehingga diperlukan upaya pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor, dengan cara menolong pertumbuhan dan mengembangkan sektor-sektor terbelakang, namun akan berlangsung lebih lambat. Pada sebagian besar daerah maupun negara, banyak diterapkan kebijakan *big push* karena mengejar pertumbuhan yang cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. LQ dan SS Kabupaten dan Kota

LAPANGAN USAHA	LOBAR		LOTENG		LOTIM		KLU		SBW		SBW BARAT		DOMPU		KAB BIMA		KOTA BIMA		KOTA MATARAM	
	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS	LQ	SS
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,95	613.713	1,20	896.159	1,27	1.033.740	1,59	278.915	1,75	1.549.018	0,18	243.305	1,78	685.581	2,00	2.720.680	0,64	48.741	0,18	110.054
B. Pertambangan dan Penggalian	0,37	248.209	0,24	307.219	0,34	500.382	0,21	41.115	0,17	121.663	4,45	(4.986.276)	0,16	56.405	0,16	190.080	0,02	1.815	0,00	(213)
C. Industri Pengolahan	1,10	150.548	1,31	128.885	1,91	183.660	0,33	12.652	0,49	69.596	0,06	15.532	0,54	47.211	0,48	106.550	0,78	16.935	2,22	497.658
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,25	7.799	0,92	6.414	1,06	8.728	1,47	2.966	1,27	9.610	0,29	3.891	0,66	2.112	0,68	4.290	2,75	2.343	1,41	10.182
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,43	4.535	1,59	3.849	0,93	2.467	1,54	1.364	0,66	1.391	0,13	853	0,33	265	0,65	2.650	0,44	99	2,33	8.755
F. Konstruksi	1,42	318.151	1,39	906.617	1,22	509.518	0,98	102.406	1,46	402.998	0,24	172.307	0,92	143.584	0,66	341.730	1,02	27.503	1,13	454.000
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	526.049	0,88	589.253	1,22	1.074.118	1,08	156.445	1,18	745.600	0,25	233.779	1,20	335.827	1,23	1.199.640	1,82	139.220	1,50	1.308.366
H. Transportasi dan Pergudangan	1,49	242.134	2,13	775.304	0,66	93.154	0,83	4.962	0,58	32.356	0,26	40.217	0,83	52.346	1,16	250.990	1,65	3.286	1,22	(913.6077)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,77	(36.568)	0,64	28.344	0,54	49.869	3,17	(30.984)	0,71	23.563	0,17	7.874	0,66	25.425	0,18	25.550	1,63	12.989	0,86	40.170
J. Informasi dan Komunikasi	1,12	173.110	0,80	144.353	0,92	187.711	0,96	36.416	0,66	104.319	0,14	39.752	0,52	38.610	0,60	92.900	0,81	21.178	3,26	650.034
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	244.589	0,67	169.994	0,76	228.516	0,85	30.993	1,14	226.544	0,13	31.809	1,00	95.483	0,99	293.220	0,73	16.681	2,97	987.765
L. Real Estate	1,13	132.805	1,23	192.187	1,16	207.849	1,44	35.348	0,72	77.663	0,25	50.074	1,10	68.869	0,91	199.270	1,76	33.069	1,64	366.701
M, N. Jasa Perusahaan	0,64	2.308	0,88	6.883	0,66	6.325	1,48	1.525	1,38	10.371	0,21	1.664	1,18	4.301	0,53	6.350	2,05	1.828	2,52	29.931
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	111.112	1,05	132.621	1,20	228.751	1,13	52.512	1,11	132.996	0,18	31.164	1,49	87.442	1,27	473.940	1,98	16.110	1,36	217.769
P. Jasa Pendidikan	1,12	217.022	1,05	210.760	1,15	318.337	1,28	75.278	1,06	224.894	0,20	71.414	1,13	106.166	0,80	268.150	1,78	55.576	1,76	577.423
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	96.276	1,31	137.858	1,13	148.921	0,89	25.494	0,65	58.228	0,13	18.498	0,80	30.538	0,52	63.520	1,74	23.184	2,46	278.236
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,18	60.480	1,10	102.213	0,99	112.071	1,07	22.130	0,81	71.015	0,18	24.437	0,87	31.780	0,60	83.870	1,81	19.758	2,35	280.905

Masing-masing Kabupaten dan Kota mempunyai mempunyai posisi sektor yang berbeda-beda, karena potensi sumber daya ekonomi daerah yang dikembangkan berbeda pula. Daerah Kabupaten pada umumnya didominasi sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan galian). Seluruh Kabupaten mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih mengandalkan sektor pertambangan dan galian. Sektor pertambangan dan galian Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai nilai

LQ sebesar 4,45 yang berarti telah mampu memenuhi ekspor, sedangkan nilai SS selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata - 4.986.276. Hasil tambang dan galian umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor, yang dibuktikan dengan nilai LQ pada sektor industri pengolahan sebesar 0,06 atau hampir tidak mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Hal ini disebabkan hasil tambang diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah yang tidak diolah sebelumnya, sehingga nilai tambah sektor industri tidak mengalami

peningkatan. Pada daerah kota (Kota Bima dan Mataram) sektor tersier mempunyai pertumbuhan dan kontribusi perekonomian yang lebih nyata, sehingga jika dikembangkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kesenjangan antardaerah

Pengukuran kesenjangan ekonomi antardaerah diukur menggunakan Indeks Williamson, dengan menggunakan parameter PDRB dan jumlah penduduk dalam waktu tertentu, sedangkan tipologi Klassen digunakan untuk penempatan daerah Kabupaten dan Kota dalam 4 kuadran dengan mengambil daerah Provinsi sebagai referensi. Pengukuran Indeks Williamson dilakukan dengan menggunakan data PDRB dan data penduduk hasil Sensus 2020, dengan hasil indeks Williamson sebesar 0,7023. Sesuai dengan kriteria, angka ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antardaerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Williamson (tahun 2020)

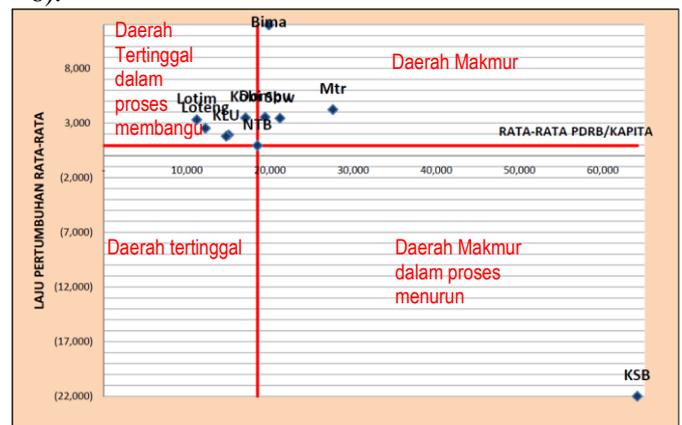
WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	PDRB (dalam Juta)	PDRB PERKAPITA	PROPORSI PENDUDUK		
	n	fi	yi/(fi/n)	(fi/n)	(yi-y) ²	(yi) ² /(fi/n)
NTB	5.320.092	93.269.133,910	17.531.489			
Kab Lobar	721.481	10.123.598,19	14.031.691	0,1356	176.657.076.321.856	23.957.240.604.442
Kab Loteng	1.034.859	11.571.990,89	11.182.191	0,1945	280.523.504.391.652	50.676.772.738.374
Kab Lotim	1.325.240	13.977.551,63	10.547.185	0,2491	281.425.656.659.911	70.103.399.947.215
Kab SBW	509.753	10.037.750,03	19.691.400	0,0958	58.240.274.574.025	5.580.383.701.059
Kab Dompu	236.665	4.896.828,58	20.690.971	0,0445	43.982.900.378.713	1.956.585.171.395
Kab Bima	514.105	11.417.670,00	22.208.829	0,0966	26.154.042.172.328	2.527.385.588.634
KSB	145.798	16.465.356,81	112.932.664	0,0274	7.329.026.422.001.150	200.853.179.658.345
KLU	247.400	3.218.914,90	13.010.974	0,0465	204.832.127.283.555	9.525.299.241.057
Kota Mtram	429.651	13.051.593,960	30.377.199	0,0808	9.328.552.134.341	753.374.519.289
Kota Bima	155.140	2.878.810,300	18.556.209	0,0292	76.855.414.440.475	2.241.192.256.881
		Rata-rata	27.322.931		Jumlah	368.174.813.426.690
						19.187.882
						Wv 0,7023

Untuk mengetahui posisi masing-masing daerah Kabupaten dan Kota, maka dilakukan pengukuran tipologi Klassen dengan parameter data PDRB dan jumlah penduduk selama 2015-2020. Berdasarkan perhitungan diperoleh gambaran kondisi yang sangat timpang antardaerah sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Tipologi Klassen (2015-2020)

No	WILAYAH	RATA-RATA PDRB PERKAPITA	RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN	STATUS DAERAH
1.	Kabupaten Lombok Barat	15,039	1,913	Tertinggal dalam proses membangun
2.	Kabupaten Lombok Tengah	12,228	2,522	Tertinggal dalam proses membangun
3.	Kabupaten Lombok Timur	11,213	3,296	Tertinggal dalam proses membangun
4.	Kabupaten Sumbawa	21,207	3,432	Makmur
5.	Kabupaten Dompu	19,417	3,527	Makmur
6.	Kabupaten Bima	19,865	11,961	Makmur
7.	Kabupaten Sumbawa Barat	121,544	(3,871)	Makmur dalam proses menurun
8.	Kabupaten Lombok Utara	14,737	1,787	Tertinggal dalam proses membangun
9.	Kota Mataram	27,574	4,222	Makmur
10.	Kota Bima	17,081	3,469	Tertinggal dalam proses membangun
	Nusa Tenggara Barat	18,492	0,930	Koordinat Referensi

Status daerah makmur yang diindikasikan oleh PDRB perkapita dan rata-rata laju pertumbuhan selama 5 tahun mempunyai nilai lebih tinggi dari daerah referensi meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram. Status daerah tertinggal dalam proses membangun, yang diindikasikan oleh rata-rata laju pertumbuhan lebih tinggi dari daerah referensi namun rata-rata PDRB perkapita lebih rendah, ditempati oleh Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Bima. Sedangkan daerah makmur dalam proses menurun yang diindikasikan oleh rata-rata PDRB perkapita lebih tinggi dari daerah referensi dan rata-rata laju pertumbuhan lebih rendah, ditempati Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk meningkatkan kemakmuran daerah, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memberikan perhatian lebih terhadap daerah dengan status tertinggal dalam proses membangun, melalui perluasan pasar terutama bagi sektor yang belum mampu menjangkau ekspor sehingga akan memberi kontribusi ekonomi daerah. Sedangkan pada daerah makmur dalam proses menurun, perlu dilakukan peningkatan produksi, peningkatan kualitas, dan peningkatan SDM yang mampu memperbaiki proses produksi. Gambar 3 menunjukkan penempatan masing-masing daerah Kabupaten dan Kota dalam 4 kuadran sesuai dengan perhitungan dalam tipologi Klassen (Tabel 6).



Gambar 3. Sebaran dalam Tipologi Klassen.

Strategi Pertumbuhan dan Transformasi

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, diarahkan pada terwujudnya (1) pengembangan agribisnis dan investasi berkualitas, (2) pengembangan pariwisata yang diandalkan, dan (3) pengembangan perindustrian unggul. Berdasarkan hasil analisis kondisi dan posisi masing-masing sektor pada Kabupaten dan Kota, serta posisi antardaerah, maka strategi percepatan pertumbuhan dan

transformasi struktural dapat ditetapkan, dengan memperhatikan.

- (1) Pengembangan agribisnis dan investasi berkualitas, meliputi pengembangan kawasan berbasis pertanian, pembangunan Dam Meninting dan saluran irigasi, pengoperasian Dam Bintang Bano, Dam Pandan Duri, Dam Mila, revitalisasi Dam Pengga, Dam Mamak, Dam Tiu Kulit, Dam Sumi, Dam Pelaparado dan saluran irigasi, pemangunan *food estate*, *shrimp estate*, Kota Terpadu Mandiri berbasis pertanian, teknologi irigasi tetes, budidaya perikanan melalui tambak, investasi perikanan laut dan mutiara, inseminasi buatan ternak sapi skala usaha rumahan, *ranch* sapi pengembangan unggas dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pengembangan pariwisata yang diandalkan, meliputi peningkatan investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan kemudahan perizinan pada kawasan potensial (Mandalika, Samota, Gili-gili, Geopark Rinjani), pengembangan desa wisata dan wisata halal (99 desa wisata), pengembangan obyek daya tarik wisata melalui penataan kawasan wisata, promosi dan informasi, pemanfaatan event-event (*World Superbike*, *MotoGP*, *MXGP*).
- (3) Pengembangan perindustrian unggul, meliputi pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, pengolahan pangan, industri kreatif dan digitalisasi, pengolahan hasil-hasil pertanian dengan melibatkan UMKM, peningkatan daya saing produk industri, pengembangan industri kecil dan menengah, serta fasilitasi pasar, pembangunan kawasan industri berbasis smelter, pengembangan ekosistem industri dan fasilitasi produksi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis teknik overlay LQ dan SS diketahui bahwa meskipun Kabupaten dan Kota mempunyai pertumbuhan yang cenderung menurun, namun masih banyak ditemukan sektor-sektor yang mampu tumbuh cepat, sektor basis dan masuk dalam katagori prima. Sektor prima jika diprioritaskan akan mempercepat pertumbuhan.

Hasil analisis indeks Williamson menunjukan nilai 0,7023 yang berarti terdapat ketimpangan antardaerah. Analisis tipologi Klassen menunjukan bahwa terdapat 3 katagori daerah yang menjadi sebaran yaitu (1) daerah makmur meliputi Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima; (2) daerah tertinggal dalam proses membangun meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota

Bima, dan (3) daerah makmur dalam proses menurun adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

Intervensi strategi dalam rangka percepatan pertumbuhan dan transformasi struktural dilakukan dengan pengembangan pertanian dan investasi, pengembangan perindustrian unggul dan pengembangan pariwisata yang diandalkan. Sektor pertanian dikembangkan dengan pengembangan kawasan berbasis pertanian, pembangunan Dam dan saluran irigasi, penggunaan teknologi irigasi tetes, inseminasi buatan pada sapi, pengembangan unggas, pemanfaatan rumah potong hewan. Perindustrian dilakukan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian, industri kreatif, industri permesinan. Pembentukan kawasan industri berbasis olahan bahan tambang (smelter). Pariwisata dikembangkan dengan brand wisata halal, desa wisata, pulau-pulau kecil serta mendorong investasi bagi pengembangan kawasan wisata unggulan (Mandalika, Samota, Geopark Rinjani).

Saran

Untuk memberi kejelasan dalam perencanaan pembangunan, maka perlu disusun perencanaan sebagai turunan RPJMD yang menyangkut jenis dan lokasi kegiatan untuk menjadi pegangan bagi pelaksana pembangunan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yogi Suwarno, STP, MA, Ph.D. dan Dr. Lalu Sajim Sastrawan, SH, MH yang telah memberi dukungan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Soleh, Hamdi Sari Maryoni. 2017. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Hubungannya dengan Kesempatan Kerja dan Investasi di Kabupaten Bangorejo. *Jurnal EKONOMI-Qu*, Volume 7 Nomor 1, APRIL 2017. <https://www.jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/download/4183/2951>.
- Arsyad, Lincoln. 2020. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2021. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto. Source Url: <https://ntb.bps.go.id/indicator/52/353/2/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>. Access Time: May 21, 2021, 10:35 pm

- Eko Wicaksono Pambudi, Miyasto. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Jhingan, ML. 2018. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Kuncoro, Mudrajad. 2019. *Ekonomi Regional. Teori dan Praktek*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Mohammad Saedy Romli, Manuntun Parulian Hutagaol, Dominicus Savio Priyarsono. 2016. Trnasformasi Struktural: Faktor-faktor dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan di Madura. *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 25-44 Vol 5 No 1. Edisi Juli 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/4000/analisis-pertumbuhan-ekonomi-dan-transformasi-struktural-di-provinsi-jawa-timur>.
- Sisilia Kosuma, Sutomo Wim Palar, Agnes L. Ch. P. Lopian. 2016. Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 02 Tahun 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/12757/12350>.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Sukirno, Sadono. 2017. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. KENCANA. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.